





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas petunjuk, bimbingan dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayapura Tahun 2021 telah dapat terselesaikan.

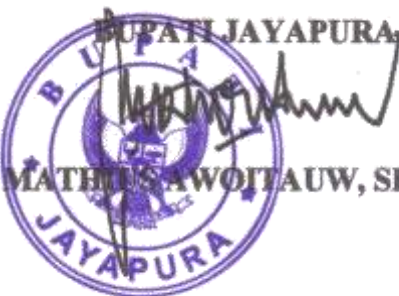
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2017-2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura

Sentani, 21 Maret 2022


MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 6 Misi, 18 Tujuan dan 49 Sasaran. Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Jayapura dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran yang semula berjumlah 49 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula berjumlah 240 indikator kinerja sasaran menjadi 49 indikator kinerja sasaran (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 60));

Mengacu pada Peraturan Bupati Jayapura Nomor 8 Tahun 2017, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja sasaran:
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori Sangat Baik (melampaui target) dan 4 indikator kategori Baik (mencapai target).
- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja sasaran :
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran kategori Sangat Baik, 1 Baik (mencapai target).
- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 14 indikator kinerja sasaran:
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 8 indikator sasaran kategori Sangat Baik (melampaui target), 3 indikator kategori Baik (mencapai target) dan kurang baik 3 (tidak mencapai target) 1 belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik.
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 9 indikator kinerja sasaran :
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 9 indikator sasaran kategori Sangat Baik sekali.
- Misi V terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 9 indikator kinerja sasaran :
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 indikator sasaran atau kategori Sangat Baik (melebihi target), sedangkan 1 indikator Baik.
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :
 - √ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran kategori Sangat Baik (melebihi target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 36 indikator sasaran atau 77,08% kategori Sangat Baik, 8 indikator sasaran atau 16,67 % kategori Baik, 3 indikator sasaran atau 6,25 % Cukup Baik, dan 1 realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 108,84 % atau bermakna SANGAT BAIK. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 SANGAT BAIK.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Kabupaten Jayapura	4
1. Aspek Geografis dan Demografis	4
a. Luas dan Batas Administrasi	4
b. Kondisi Demografis	5
c. Distribusi Penyebaran Penduduk	7
2. Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi	8
a) Pertumbuhan PDRB	8
b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	19
1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Jayapura	19
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura	19
a. Sekretariat Daerah	19
b. Sekretariat DPRD	20
c. Dinas Daerah	20
d. Lembaga Teknis Daerah	20
e. Distrik	21
f. Kelurahan/Kampung	21
3. Susunan Perangkat Daerah.....	21
4. Personil/Pegawai.....	24
5. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	26
B. Arah Kebijakan	33



1. Visi	33
2. Misi	37
3. Tujuan dan Sasaran	38
4. Rencana Kinerja Tahunan	40
5. Perjanjian Kerja	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 ...	44
B. Analisis Capaian Kinerja	47
C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura	63
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	64
2. Pengelolaan Belanja Daerah	65
3. Kondisi Pembiayaan Daerah	67
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	72
1. Penetapan Kinerja Tahun 2021	
2. Penetapan Kinerja Tahun 2022	
3. Pernyataan Telah Direview Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021.....	
4. Penghargaan Yang Pernah Diterima Kabupaten Jayapura Tahun 2021.....	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017-2022	6
1.2. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah Tahun 2021	7
1.3. Jumlah penduduk berdasarkan Kepadatan Tahun 2021	8
1.4. Perkembangan Inflasi Kab. Jayapura dan Inflasi Nasional 2017-2021	12
1.5. Perkembangan IPM Kab. Jayapura Tahun 2017 - 2021	15
1.6. Jumlah Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021	22
2.1. Perumusan Misi	35
2.2. Penjelasan Visi	37
2.3. Penjelasan Misi	38
2.4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021	41
3.1. Skala Nilai Peringkat	44
3.2. Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran	45
3.3. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	46
3.4. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	47
3.5. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	49
3.7. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	51
3.8. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	52
3.9. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	53
3.10. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	55
3.11. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	56
3.12. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	58
3.13. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	59
3.14. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	60
3.15. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11	61
3.16. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12	62
3.25. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jayapura	5
2.1. Struktur Organisasi	23
2.2. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021	16
1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021	17
1.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kab. Jayapura Tahun 2018-2021	13
1.4. Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021	15
1.5. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021	16
1.6. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayapura Tahun 2021	17
1.7. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021	18
1.8. Pencapaian Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2021	18



**TARIAN ADAT KHAS
WILAYAH MAMBERAMO TAMI (MAMTA)**



**“AKU PAPUA”
Kulit Hitam, Keriting Rambut “Aku Papua”
Biar Bumi akan Terbelah “Aku Papua”**



**FESTIFAL DANAU SENTANI
AGENDA TAHUNAN DESTINASI PARIWISATA
DI KABUPATEN JAYAPURA**



**BAB I
PENDAHULUAN**

**TARI ISOSOLO, MERUPAKAN TARIAN
SELAMAT DATANG DARI SENTANI**



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang disampaikan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Penyusunan LKjIP Kabupaten Jayapura ini berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :



1. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;*
4. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
5. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;*
6. *Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027; dan*
7. *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura*
8. *Peraturan Bupati Jayapura Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017–2022*
9. *Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021.*

Sedangkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 – 2022.

Maksud Penyusunan LKjIP Kabupaten Jayapura Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 dan juga sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



C. Gambaran Umum Kabupaten Jayapura

1. Aspek Geografis Dan Demografi.

Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten induk yang telah dimekarkan beberapa kali. Pada tahun 1983, Kecamatan Jayapura Selatan, Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Abepura dimekarkan menjadi satu wilayah administrasi sendiri, yaitu Kotamadya Jayapura, yang akhirnya menjadi Kota Jayapura saat ini. Kemudian pada Tahun 2003, Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kecamatan Sarmi, Bonggo, Pantai Barat, Pantai Timur, Mamberamo Hilir dan Mamberamo Hulu menjadi satu Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Sarmi; wilayah Kecamatan Arso, Skanto, Waris, Senggi dan Web menjadi satu Kabupaten Pemekaran, yakni Kabupaten Keerom; dan Kabupaten induk Jayapura tetap Kabupaten Jayapura.

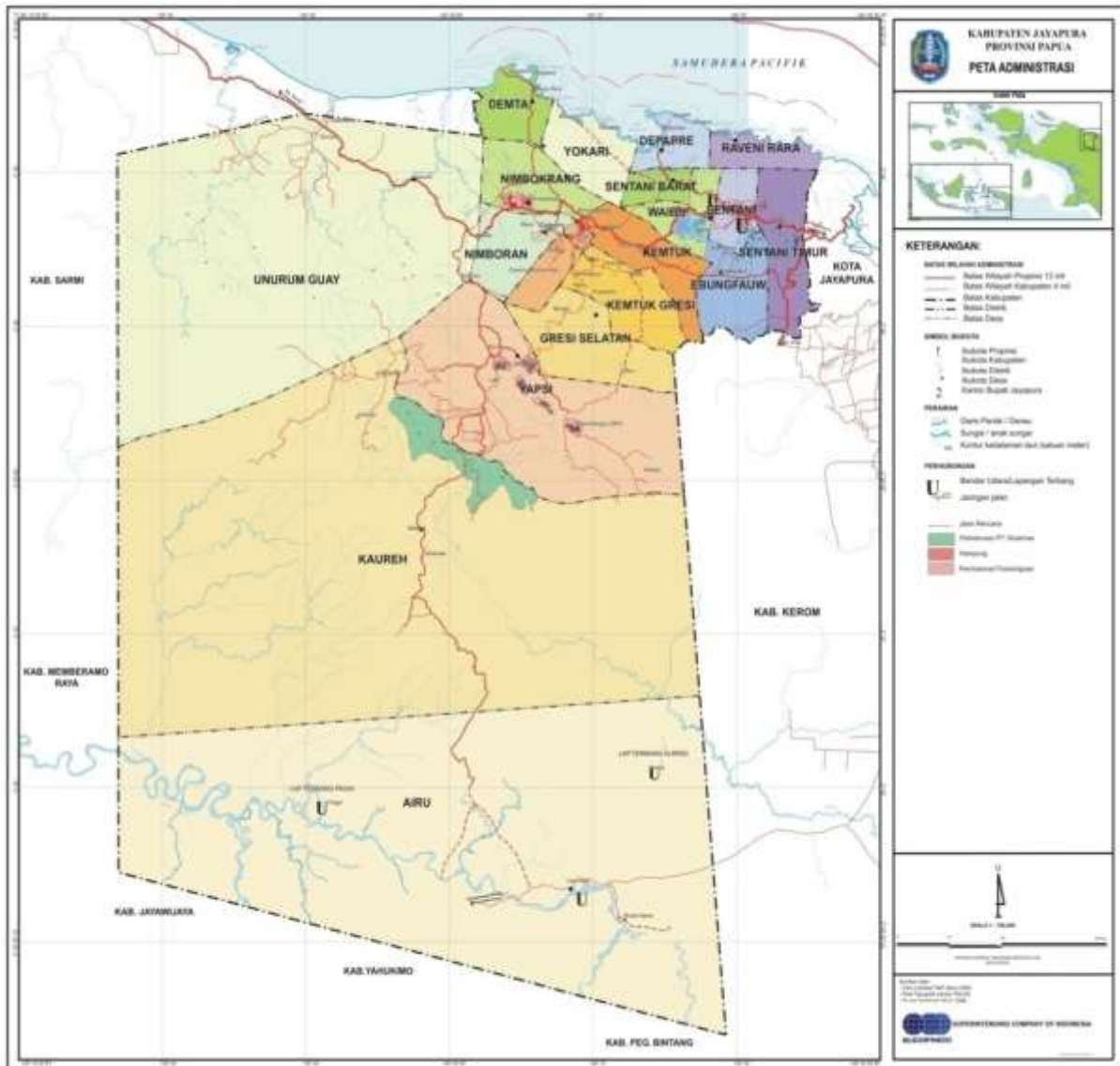
Melalui UU No.26 tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten baru di Provinsi Papua, maka wilayah administratif Kabupaten Jayapura mengalami penyesuaian yang semula terdiri dari 24 Distrik berkurang menjadi 11 Distrik dan lima kelurahan serta 106 kampung. Kondisi ini berubah seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Ebung Fau, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi dan Distrik Airu di Kabupaten Jayapura di daerah ini bertambah menjadi 19 distrik Kemudian pada tahun 2006 dilaksanakan lagi penambahan tiga distrik dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 2/2006 tentang pembentukan Distrik Ravenirara, Distrik Yokari, dan Gresi Selatan. Sejak Tahun 2017 Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, 139 Kampung dan 5 Kelurahan.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Luas wilayah Kabupaten Jayapura mencapai 17.516,6 km² dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi; Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Jayapura



Sumber : RPJMD Bappeda Kabupaten Jayapura

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2021 berdasarkan hasil pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura berjumlah 171.837 jiwa, yang terdiri dari 89.636 jiwa penduduk laki-laki dan 82.201 jiwa penduduk perempuan. Dengan wilayah seluas 17.516,6 km persegi berarti tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jayapura 9,81 jiwa / Km

Adapun keadaan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura selama pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

NO	DISTRIK	KELOMPOK UMUR								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
1	SENTANI	5,075	7,699	7,712	7,582	8,146	7,768	6,741	6,136	4,978
2	SENTANI TIMUR	625	1,049	1,134	1,188	1,096	856	766	762	585
3	DEPAPRE	313	561	653	615	530	448	361	298	210
4	SENTANI BARAT	409	654	671	643	621	517	398	364	336
5	KEMTUK	324	599	605	511	468	381	328	307	203
6	KEMTUK GRESI	313	599	681	561	490	395	335	277	230
7	NIMBORAN	292	520	543	525	422	362	328	280	254
8	NIMBOKRANG	444	695	706	715	584	504	451	560	580
9	UNURUM GUAY	190	344	415	310	308	253	212	235	214
10	DEMTA	185	386	424	479	359	311	220	198	157
11	KAUREH	407	1,043	1,191	1,086	745	693	817	877	818
12	EBUNGFAUW	252	414	469	398	323	279	249	208	168
13	WAIBU	1,584	2,426	2,462	2,087	2,029	2,126	1994	1,956	1,513
14	NAMBLONG	205	404	395	382	306	275	264	249	244
15	YAPSI	431	665	716	628	615	582	491	504	423
16	AIRU	47	159	179	159	94	134	100	69	88
17	RAVENIRARA	82	177	203	188	114	105	97	86	69
18	GRESI SELATAN	62	135	172	160	130	114	97	85	52
19	YOKARI	124	300	336	342	256	213	157	114	97
	JUMLAH	11,364	18,829	11,364	11,364	11,364	11,364	14,406	13,565	11,219

Lanjutan Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021

NO	DISTRIK	KELOMPOK UMUR								
		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 DST
1	SENTANI	3,926	3,022	2,356	1,437	892	487	245	134	56
2	SENTANI TIMUR	530	400	351	269	178	88	47	16	4
3	DEPAPRE	208	193	209	156	102	52	39	9	5
4	SENTANI BARAT	283	246	201	149	107	66	29	18	5
5	KEMTUK	199	170	123	105	97	22	15	5	2
6	KEMTUK GRESI	196	178	157	142	116	40	19	1	-
7	NIMBORAN	210	163	176	129	89	45	21	6	290
8	NIMBOKRANG	491	344	335	129	89	45	21	6	290
9	UNURUM GUAY	154	122	91	63	34	17	10	-	1
10	DEMTA	153	143	150	120	64	28	16	6	3
11	KAUREH	559	354	183	90	54	11	6	-	1
12	EBUNGFAUW	146	118	96	128	66	40	16	6	3
13	WAIBU	1,120	718	488	315	213	79	45	11	3
14	NAMBLOUNG	200	190	151	135	99	70	17	7	2
15	YAPSI	388	383	286	196	114	73	38	12	9
16	AIRU	19	22	13	5	5	1	-	-	-
17	RAVENIRARA	60	46	47	55	43	22	6	3	3
18	GRESI SELATAN	47	35	50	37	22	8	8	-	-
19	YOKARI	91	68	81	58	56	17	10	4	-
	JUMLAH	8,980	6,915	5,544	3,718	2,440	1,211	608	244	677

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Jayapura, 2022



c. Distribusi Penyebaran penduduk.

Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, pada Tahun 2021 Kepadatan penduduk di Kabupaten Jayapura 9,81 jiwa / Km. Penyebaran penduduk di Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan 1.3 berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk berdasarkan wilayah Tahun 2021

DISTRIK	Ibukota	Luas wilayah (Km ²)	%	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PENDUDUK		
				KEL/KPG	KK	L	P	JML
SENTANI	Hinekombe	225.90	1.29	10	24,133	38,951	35,459	74,410
SENTANI TIMUR	Nolokla	484.30	2.76	7	2,901	5,070	4,878	9,948
DEPAPRE	Waiya	404.30	2.31	8	1,325	2,588	2,379	4,967
SENTANI BARAT	Waibron	129.20	0.74	5	1,647	2,956	2,762	5,718
KEMTUK	Sama	258.30	1.48	12	1,184	2,240	2,229	4,469
KEMTUK GRESI	Sawoi	182.40	1.04	12	1,234	2,402	2,328	4,730
NIMBORAN	Tabri	710.20	4.05	14	1,246	2,196	2,171	4,367
NIMBOKRANG	Nimbokrang	774.80	4.42	9	2,363	3,676	3,487	7,163
UNURUM GUAY	Garusa	3,131.30	17.88	6	950	1,608	1,366	2,974
DEMTA	Demta	497.50	2.84	7	938	1,791	1,615	3,406
KAUREH	Lapua	4,357.90	24.88	5	2,917	4,834	4,102	8,936
EBUNGFAUW	Khameyakha	387.40	2.21	5	963	1,737	1,644	3,381
WAIBU	Doyo Lama	258.30	1.47	7	6,674	11,137	10,037	21,174
NAMBLONG	Karya Bumi	193.70	1.11	9	1,158	1,832	1,766	3,598
YAPSI	Bumi Sahaja	1,291.30	7.37	9	2,098	3,478	3,078	6,556
AIRU	Hulu Atas	3,099.00	17.69	6	337	600	494	1,094
RAVENIRARA	Necheibe	467.40	2.67	4	385	726	681	1,407
GRESI SELATAN	Bangai	143.90	0.82	4	363	599	615	1,214
YOKARI	Meukisi	519.50	2.97	5	565	1,215	1,110	2,325
J U M L A H	-	17,516.60	100.0	144.0	53,381	89,636	82,201	171,837

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Jayapura, 2022



Tabel 1.3

Jumlah penduduk berdasarkan Kepadatan Tahun 2021

NO	DISTRK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN
1	SENTANI	225.9	74.400	329.39
2	SENTANI TIMUR	484.3	9.948	20.54
3	DEPA PRE	404.3	4.967	12.29
4	SENTANI BARAT	129.2	5.718	44.26
5	KEMTUK	258.3	4.469	17.30
6	KEMTUK GRESI	182.4	4.730	25.93
7	NIMBORAN	710.2	4.367	6.15
8	NIMBOKRANG	774.8	7.163	9.24
9	UNURUM GUAY	3.131.30	2.974	0.95
10	DEMTA	497.5	3.406	6.85
11	KAUREH	4.357.90	8.936	2.05
12	EBUNGFAUW	387.4	3.381	8.73
13	WAMBU	258.3	21.174	81.97
14	NAMBLONG	193.7	3.598	18.58
15	YAPSI	1.291.30	6.556	5.08
16	AIRU	3.099	1.094	0.35
17	RAVENIRARA	467.4	1.407	3.01
18	GRESISELATAN	143.9	1.214	8.44
19	YOKARI	519.5	2.325	4.48
	TOTAL	17.516.6	171.837	9.81

Sumber: Dinas Dukcapil dan Bappeda Kabupaten Jayapura 2021, diolah 2022

Berdasarkan data di atas, Distrik Sentani merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 329,39 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil adalah Distrik Airu yang mencapai 0,35 jiwa/km².

2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menguraikan tentang Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB.

PDRB Kabupaten Jayapura dapat diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tiap nilai dan kontribusi lapangan usaha yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan PDRB Kabupaten Jayapura.



a) Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha ADHB Terhadap PDRB.

Tahun 2020, Kontribusi lapangan usaha ADHB terhadap PDRB Kabupaten Jayapura yang tertinggi terdapat pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yakni Rp. 3.108.273.92 juta (19.35%) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3.253.144.65 juta (18.94%). Kontribusi lapangan usaha ADHB terhadap PDRB yang juga mengalami peningkatan adalah lapangan usaha konstruksi yakni sebesar Rp. 2.728.865.36 juta (16.99%) pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.904.308.63 juta (16.91%). Kontribusi lapangan usaha ADHB terhadap PDRB Kabupaten Jayapura yang terendah Tahun 2020 terdapat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yakni Rp. 191.588.49 (1.19%) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 202.422.98 (1.18%). Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya ketersediaan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap akomodasi dan makan minum yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang juga mengalami peningkatan adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp. 2.185.475.97 juta (13.61%) pada tahun 2020 sementara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.408.837.48 (14.02%). Nilai kontribusi lapangan usaha konstruksi lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

b) Kontribusi Lapangan Usaha ADHK Terhadap PDRB.

Setiap tahun, kontribusi lapangan usaha ADHK terhadap PDRB di Kabupaten Jayapura pada dasarnya mengalami peningkatan. Kontribusi lapangan usaha ADHK terhadap PDRB tahun 2021 masih didominasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar Rp. 2.036.784.42 juta (19.83%). Besarnya kontribusi ini masih lebih tinggi bila



dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 2.019.972.49 juta (20.66%). Tahun 2019 sebesar Rp. 2.021.500.67 juta (20.26%) hingga sampai dengan tahun 2018 dengan kontribusi sebesar Rp. 2.000.684.72 juta (21.48%). Rata-rata peningkatan untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 2.019.735,58 juta dan perkembangannya adalah 20,54%. Selanjutnya untuk Kontribusi lapangan usaha ADHK terhadap PDRB yang terjadi pada lapangan usaha konstruksi juga sama halnya dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 kontribusinya sebesar Rp. 1.312.110.45 juta, tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 1.462.970.87 juta, tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 1.523.083.99 juta dan pada tahun 2021 kontribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.619.238.19 juta. Rata-rata peningkatan untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 1.479.350,88 juta dan perkembangannya adalah 15,04%.

Sedangkan kontribusi lapangan usaha ADHK terhadap PDRB Kabupaten Jayapura yang terendah adalah terdapat pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 3.651.65 (0.04%) pada tahun 2020 sementara tahun 2021 sebesar Rp. 3.737.14 (0.04%). Rendahnya nilai kontribusi lapangan usaha pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB disebabkan karena tidak meratanya penyebaran ketenagalistrikan dan gas di Kabupaten Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya penggunaan listrik dan gas di kalangan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Jayapura harus semakin gencar dalam memobilisasi sumber daya yang ada serta sosialisasi penggunaan listrik dan gas guna meningkatkan sumbangsih lapangan usaha di bidang ketenagalistrikan dan gas, sehingga kemajuan ekonomi daerah dapat terjadi secara berkesinambungan.

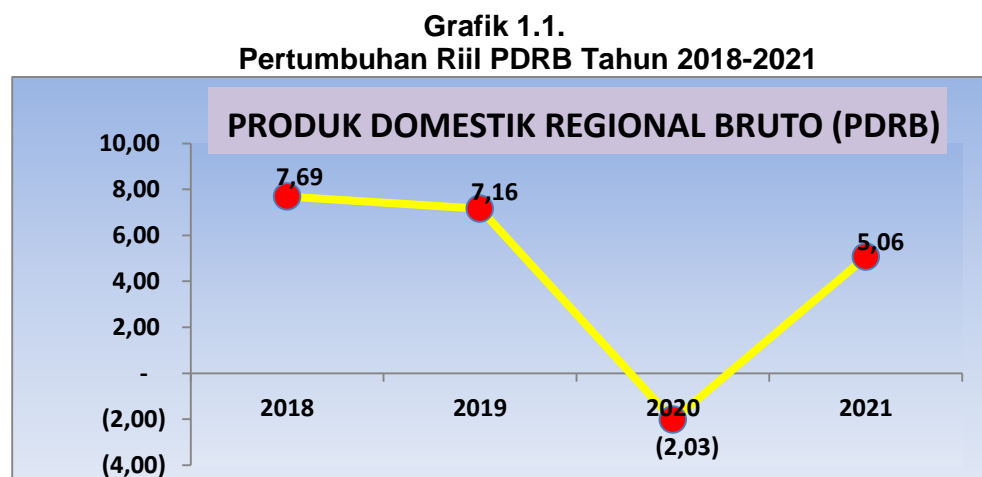
Secara umum dapat dikatakan bahwa kontribusi sektor terhadap PDRB baik atas dasar ADHB maupun ADHK masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki karakteristik daerah



pertanian, kehutanan dan perikanan atau daerah agraris. Dominasi sektor PDRB merupakan salah satu komponen untuk melakukan analisis unggulan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk yang dominan di Kabupaten Jayapura adalah di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

c) **Pertumbuhan Riil PDRB.**

Pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 mencapai sebesar 7.69%, tahun 2019 sebesar 7.16%, 2020 sebesar -2.03% dan 2021 sebesar 5.06%, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber data: PDRB Kabupaten Jayapura, 2022

d. **Tingkat Inflasi.**

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum cenderung meningkat. Adapun yang dimaksudkan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan harga dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha, penambahan keuntungan akan menggalakkan investasi dimasa datang dan pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Dampak negatif



pada perekonomian diantaranya daya tarik penanaman modal, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya beli masyarakat.

Berdasarkan data tingkat inflasi yang dilansir oleh BPS Provinsi Papua dan Bank Indonesia Tahun 2021 tingkat inflasi per Desember dalam periode waktu 2018 hingga 2021 terdapat fluktuasi tingkatan inflasi untuk masing masing lingkup wilayah. Jika dilihat pada tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Jayapura yang mengikuti tingkat inflasi pada Kota Jayapura. Tingkat inflasi Kabupaten Jayapura Tahun 2018 yaitu 6.70%. Nilai ini masih lebih tinggi dari tingkat Nasional yaitu mencapai 3.13%. Tingkat inflasi Kabupaten Jayapura mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, yakni masing-masing sebesar 0.60% dan 0.75% dan masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional, yakni 2.72% dan 1.68%. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat inflasi Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan yaitu 1.02%, dimana tingkat inflasi Kabupaten Jayapura masih lebih rendah dibanding tingkat inflasi Nasional, yakni 1.68%. Dengan demikian tingkat inflasi pada Kabupaten Jayapura dapat dikatakan mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa tingkat harga barang di Kabupaten Jayapura cenderung tidak stabil atau mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan harga dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Jayapura dan Inflasi Nasional
Tahun 2017-2021

Uraian Kab/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Jayapura	2.41	6.70	0.60	0.75	1.02
Nasional	3.61	3.13	2.72	1.68	1.68

Sumber data: BPS Provinsi Papua dan Bank Indonesia, 2022

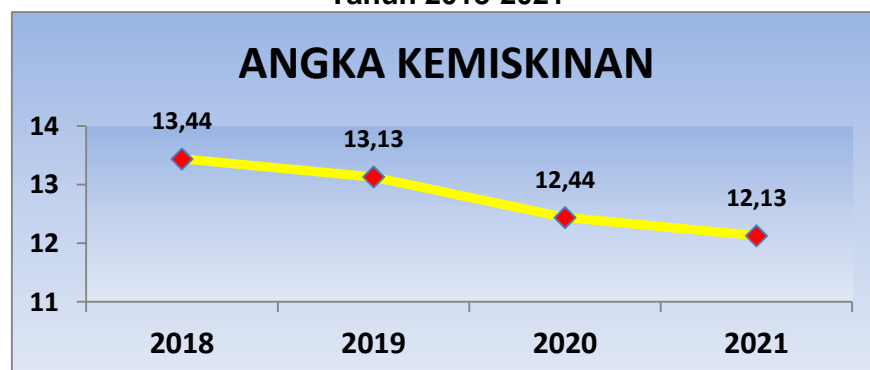


e. Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu daerah/wilayah atau negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap daerah/wilayah atau negara yang memiliki anggota masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan pada suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar pengendalian terhadap tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 sebesar 13,44% dan mengalami penurunan pada tahun 2019, yakni sebesar 13,13. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 12,44% dan tahun 2021 tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai 12,13%, dapat yang dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.2.
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jayapura
Tahun 2018-2021



Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura, 2022

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa



faktor antara lain meningkatnya kontribusi beberapa sektor terhadap PDRB misalnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang meningkat sehingga stabilitas harga masih stabil, laju inflasi menurun serta factor lainnya. Laju tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,49%.

f. Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan, dimana seseorang merasa nyaman, tenang, bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial juga merupakan usaha secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang berdasarkan konteks. Ini termasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan di masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi, seni budaya dan olahraga. Berikut beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Jayapura adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan seni budaya serta olahraga.

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan, bukan hanya dari sisi ekonomi saja, namun juga dari sisi kualitas hidup atau meningkatkan kesejahteraan sosial.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah/ daerah atau negara maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah/d daerah atau negara.

Sedangkan untuk pencapaian angka IPM di Kabupaten Jayapura pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut di Kabupaten Jayapura dapat dikatakan



berhasil dalam perencanaan pembangunan manusia. Berikut adalah Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura pada tahun 2017-2021 sebagaimana yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

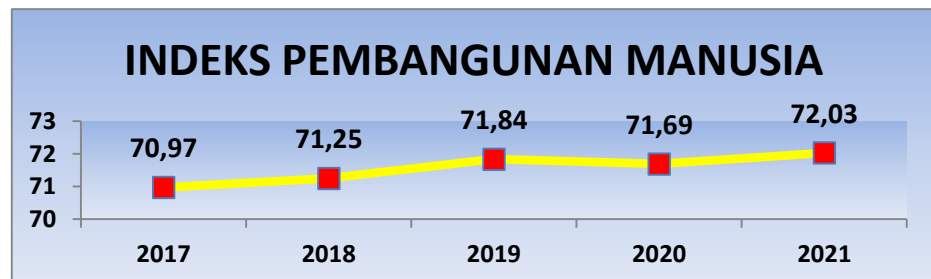
Tabel 1.5.
Perkembangan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021

Komponen IPM	2017	2018	2019	2020	2021
1. Angka Harapan Hidup (%)	66,47	66,66	66,93	67,05	67,16
2. Harapan Lama Sekolah (%)	14.16	14.17	14,19	14,20	14.39
3. Rata-rata Lama Sekolah/Angka Melek Huruf (%)	9.54	9.60	9,79	10,04	10.05
4. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.055	10.160	10.375	9.898	9,989
5. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70.97	71.25	71.84	71.69	72.03

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura, 2022

Untuk mengukur perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dapat digunakan ukuran pertumbuhan IPM per Tahun. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standard hidup. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian IPM saat ini dengan capaian IPM pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin tinggi IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.3.
Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021



Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura, 2022

Dalam meningkatkan IPM Kabupaten Jayapura, Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap



beberapa aspek seperti: 1) Angka Harapan Hidup (AHH), 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ALS)/Angka Melek Huruf, 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS), 4) Angka Partisipasi Kasar (APK), dan 5) Angka Partisipasi Murni (APM).

a) Angka Harapan Hidup (AHH).

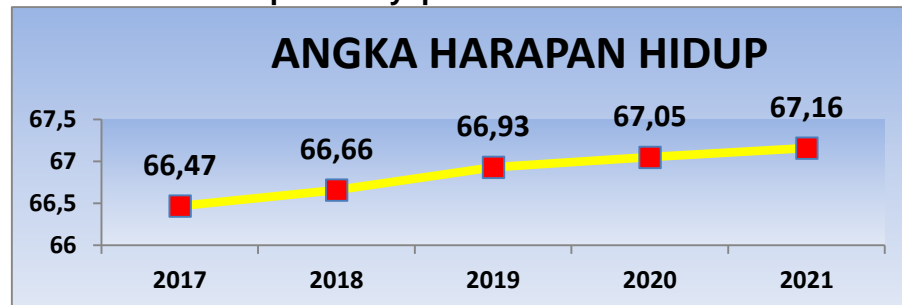
Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah AHH (Angka Harapan Hidup), semakin tinggi AHH memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk di suatu daerah.

Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 adalah sebesar 67.16%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Jayapura dapat hidup hingga usia 66 tahun. AHH di Kabupaten Jayapura dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan AHH Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2021 hanya mengalami sedikit perubahan, yaitu 0.16% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.18%.

Angka harapan hidup juga erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, sehingga peningkatan angka harapan hidup merupakan indikasi yang positif bahwa pembangunan di lapangan usaha kesehatan Kabupaten Jayapura dari tahun ke tahun memberikan dampak yang positif bagi penduduk Kabupaten Jayapura. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 1.4.
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021

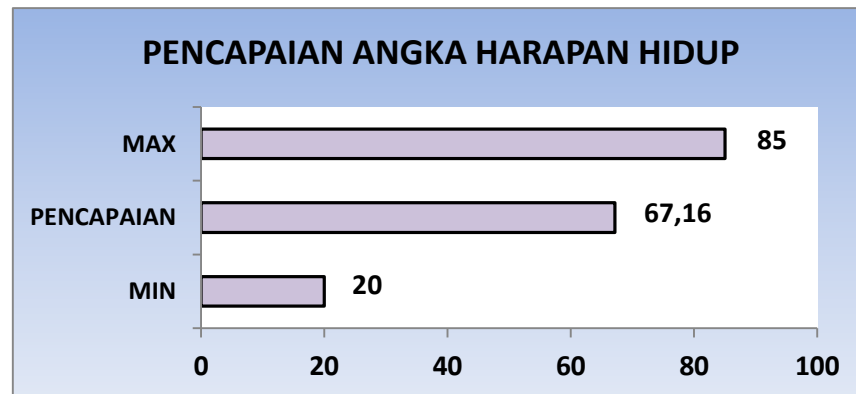


Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura, 2022

Jika dilihat perkembangan indeks pencapaian AHH terhadap standar global dari Tahun 2017 sampai tahun 2021, maka rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0.23% per tahun. Hal ini, menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja yang positif bagi pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi kesehatan perlu adanya pemerataan pembangunan manusia di bidang kesehatan, misalnya dengan meningkatkan kualitas/kuantitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya masih kurang memadai, seperti di Distrik Airu dan distrik-distrik lainnya serta kampung-kampung yang jarak jangkauan terhadap fasilitas kesehatannya masih terbilang jauh atau sulit aksesnya. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 1.5.
Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Jayapura Tahun 2021



Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura, 2022 (data diolah)

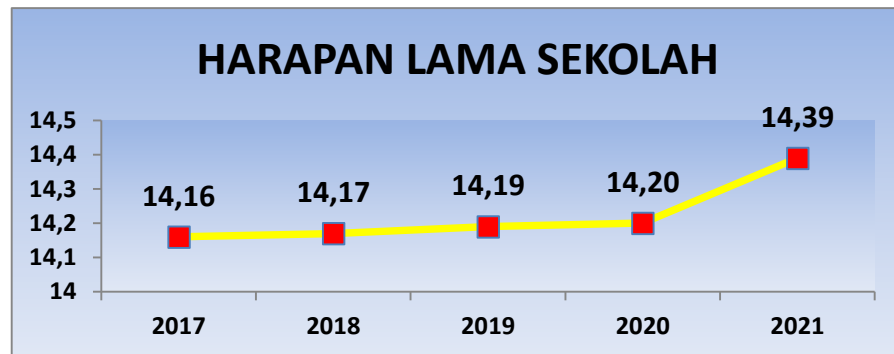
b) Harapan Lama Sekolah (HLS).

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan di bidang pendidikan berbagai jenjang. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya, sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per-jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Jayapura dapat dikatakan tumbuh cukup meningkat selama lima tahun semenjak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2017 sebesar 14,16% dan tahun 2018 meningkat menjadi 14,17%, sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat masing-masing sebesar 14,19% dan 14,20% serta tahun 2021 meningkat menjadi 14,39%, dapat dilihat pada grafik 1.6 dan 1.7.

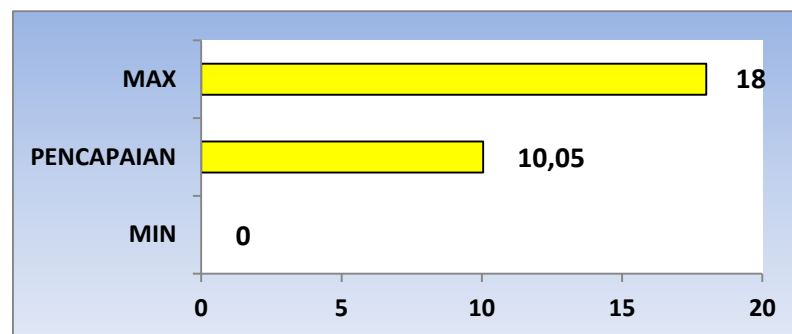


Grafik 1.6.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2021



Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura, 2022

Grafik 1.7.
Pencapaian Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten
Jayapura Tahun 2021



Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura, 2022

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2018 masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura



Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Jayapura.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura seiring dengan perubahan paradigma berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana aspek desentralisasi lebih ditekankan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri semakin mapan seiring dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jayapura.

a. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Distrik dan Kampung/Kelurahan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung



pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidangnya, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyediaan pelayanan penunjang;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Distrik

Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Distrik, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;



5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kampung/Kelurahan.

f. Kelurahan/Kampung

Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas membantu Distrik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dengan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Susunan Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Kabupaten Jayapura telah melakukan penataan dan restrukturisasi kelembagaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura. Restrukturisasi terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah telah membentuk Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terdiri: 7 Badan, 25 Dinas, 2 Sekretariat (yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), 19 Distrik, dan 139 Kampung serta 5 Kelurahan.

4. Personil/Pegawai

Jumlah personil/aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 3.734 pegawai (status PNS dan CPNS). Gambaran kondisi aparatur di Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

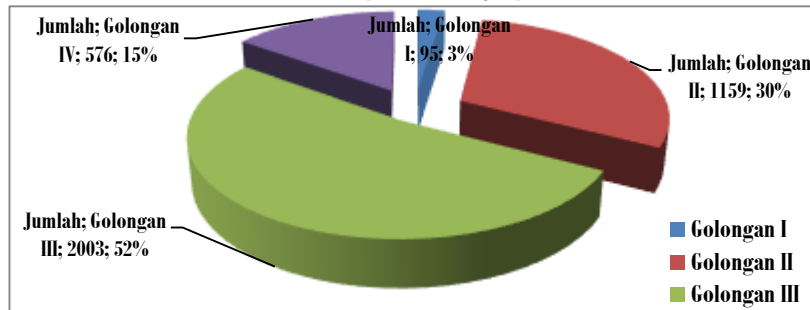
Tabel 1.7
Jumlah Pejabat Struktural di Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2021

Nb	Pejabat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	0	1	1
2	Eselon II b	32	0	32
3	Eselon III a	40	11	51
4	Eselon III b	62	29	91
5	Eselon IV a	229	172	401
6	Eselon IV b	3	2	5
	Jumlah	366	215	581

Sumber : BKP dan SDM Kab. Jayapura, 2022 diolah 2022



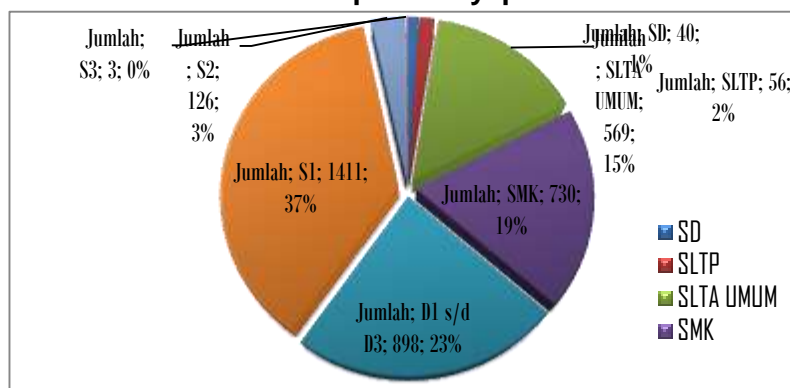
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021



Sumber : BKP dan SDM Kab. Jayapura, 2021 (data diolah)

Jumlah pegawai di Kabupaten Jayapura terbanyak adalah terdiri dari Golongan III bila dibandingkan dengan jumlah pegawai Golongan II dan yang lainnya, hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021



Sumber : BKPSM Kab. Jayapura, 2021 (data diolah)

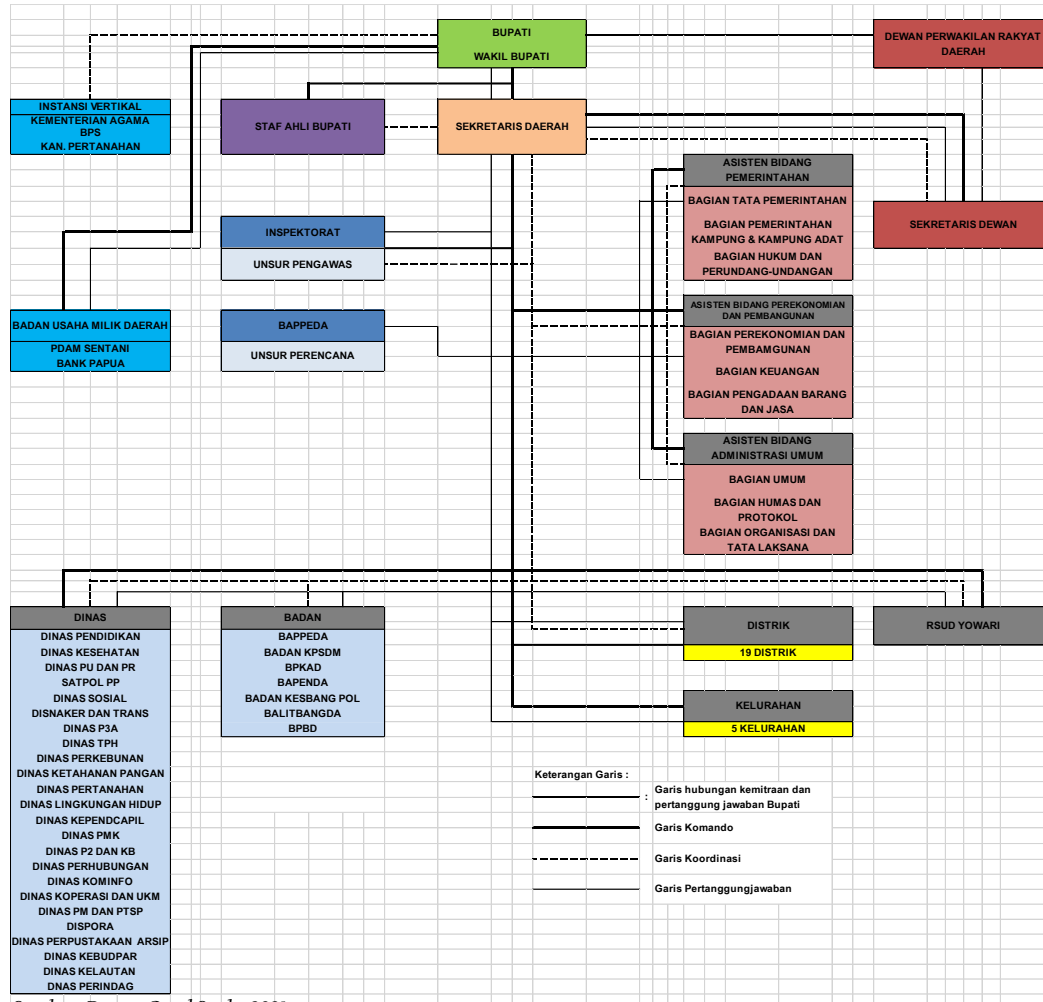
Berdasarkan tingkat pendidikan, maka pegawai di Pemerintah Kabupaten Jayapura lebih dominan memiliki latar belakang ijazah setara dengan S1 hingga ijazah S3 dibandingkan dengan yang memiliki ijazah setingkat SD hingga SLTA dengan perbandingan 43% untuk S1 s/d S3 sedangkan yang berpendidikan SD hingga SLTA sebesar 37% atau terputus sekitar 6% masih lebih banyak S1 hingga S3, sisanya Diploma (D1 hingga D3) sebanyak 23%.

Potensi SDM aparatur tersebut diatas diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Jayapura. Sedangkan



untuk mengetahui struktur organisasi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura serta alurnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi sebagaimana berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jayapura



Sumber : Bagian Ortal Setda, 2021



D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Singkat Kabupaten Jayapura, Gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2021 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017-2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian ralisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka meningkatkan kinerjanya.





A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 dapat dirumuskan sebagai berikut.

Strategi-1 : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk seluruh wilayah dengan pembelajaran yang memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan semua pihak yang didukung oleh sarana-prasarana yang memadai.

Pendidikan adalah pilar utama dalam meningkatkan kualitas manusia. Salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini adalah kurang optimalnya tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas. Karena itu, kecukupan tenaga pendidik yang menjalankan proses pembelajaran berkualitas pada setiap distrik/kampung merupakan tantangan yang harus dipenuhi. Seiring dengan itu, ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai diupayakan terpenuhi secara proporsional sesuai kebutuhan setiap distrik/kampung guna memenuhi standar pelayanan minimal urusan pendidikan. Kecukupan tenaga pendidik yang berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada gilirannya terorientasikan untuk tidak hanya memaknai pendidikan sebagai pengajaran pengetahuan ilmiah yang universal, tetapi juga sebagai penggalian karakteristik asli dalam bentuk pengetahuan/kearifan lokal untuk diaktualkan dalam kurikulum pendidikan muatan lokal dan berinteraksi



dalam kehidupan lokal dan dunia luar.

Dengan itu, SDM yang dilahirkan dapat mengaktualkan jati dirinya sebagai orang Jayapura-Papua sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang bersentuhan dengan dirinya. Sehingga untuk tercapainya hasil keluaran pendidikan yang berkualitas diperlukan pelibatan semua *stakeholder* termasuk orang tua dan masyarakat.

Strategi-2 : Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tuberculosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS.

Strategi-3: Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja dan pelaku usaha

Peningkatan kualitas manusia dapat ditempuh melalui pengembangan kompetensi atas sumberdaya manusia yang ada. Salah satu masalah di Kabupaten Jayapura adalah adanya ketertinggalan kompetensi teknis dan kompetensi kewirausahaan penduduk asli dari penduduk pendatang. Karena itu diperlukan upaya sistematis dan terfokus pada peningkatan kompetensi teknis dan kewirausahaan atas penduduk asli tersebut, agar dapat bersinergi dengan penduduk pendatang dalam memajukan perekonomian daerah. Peningkatan kompetensi teknis dan kewirausahaan menjadi salah satu perhatian dalam menguatkan posisi distrik sebagai pusat pelatihan, dimana pada pusat distrik perangkat daerah menempatkan aparatnya untuk melatih SDM dari berbagai kampung dan kampung adat pada distrik tersebut, sehingga dengan keterampilan dan keahlian yang diperoleh warga kampung dan



kampung adat lebih berdaya dalam mengelola potensi sumberdaya.

Strategi-4: Penguatan masyarakat hukum adat melalui pemberian pengakuan terhadap kelembagaan adat yang sudah ada

Fokus dari strategi ini adalah pemberian pengakuan kepada masyarakat hukum adat sejalan dengan kewenangan yang diberikan melalui Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam pengakuan itu, masyarakat telah memiliki kelembagaan adat yang didalamnya tercakup aturan, struktur dan wilayah. Dengan pengakuan itu, masyarakat adat sebagai orang asli akan mendapatkan spirit baru untuk terlibat dalam pembangunan. Termasuk dalam strategi ini adalah pengakuan hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya pada wilayah hukum adat tersebut.

Strategi-5 : Pengembangan kampung adat dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, desa adat dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi daerah. Kabupaten Jayapura memiliki karakteristik dan potensi untuk mengembangkan kampung adat karena dalam tatanan masyarakat terdapat struktur masyarakat adat, kesatuan nilai-nilai adat yang dianut dan hak-hak setiap suku atau klen. Kampung adat yang dimaksud memiliki karakteristik beranggotakan masyarakat adat dari wilayah yang dihuni, masih memberlakukan aturan-aturan adat bagi anggotanya, memiliki pola kepemimpinan menurut sistem kepemimpinan yang dianut dalam struktur masyarakat adat, memiliki kesatuan geneologis, memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial, dan memiliki hak ulayat tradisional. Bentuk pemerintahan pada kampung adat sesuai dengan sistem kepemimpinan adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui. Dengan pembentukan dan pengembangan kampung adat maka peran masyarakat hukum adat diharapkan mendapatkan spirit yang lebih nyata untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Strategi-6 : Pengembangan ekonomi kerakyatan

Perekonomian Kabupaten Jayapura ditopang oleh perkembangan usaha ekonomi yang ditunjang oleh kekuatan modal besar terutama pada sektor



perkebunan, perdagangan dan industri di satu sisi, dan pada sisi lainnya berkembang ekonomi kerakyatan pada bidang usaha pertanian dan perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat serta usaha mikro dan usaha kecil. Pengembangan ekonomi kerakyatan difokuskan pada penguatan inovasi dan teknologi tepat guna, modal usaha dan jiwa kewirausahaan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk berbagai usaha ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan tanaman bahan pangan yang sesuai dengan sistem sosial budaya pangan masyarakat yakni pengembangan sagu dan ubi-ubian sebagai basis ketahanan pangan masyarakat serta pengembangan pariwisata berbasis keunikan budaya dan alam pada level kampung atau kampung adat.

Strategi-7 : Pengembangan infrastruktur wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelayakan

Penyediaan infrastruktur wilayah merupakan hak warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Untuk itu, perlu dilakukan penyediaan dan peningkatan layanan infrastruktur di wilayah kota dan kampung secara memadai, efisien, efektif, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berkelayakan. Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat. Cakupan utama penyediaan infrastruktur wilayah adalah sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara dalam meningkatkan konektivitas antar distrik/kampung serta antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Cakupan lain adalah pemenuhan infrastruktur perumahan dan pemukiman untuk mewujudkan rumah tinggal dan pemukiman layak huni.

Strategi-8 : Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat aktivitas

Ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik yang memuaskan telah semakin tinggi dan berkonsekuensi pada diperlukannya perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara terus menerus. Perbaikan tatakelola terkait dengan penerapan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan secara internal birokrasi maupun dalam interkoneksinya dengan masyarakat sipil dan dunia usaha. Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah pembaharuan dan perubahan



mendasar secara terus menerus terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek-aspek yang terkait dengan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Dalam konteks Kabupaten Jayapura, substansi perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi ini selain terkait dengan eksistensi perangkat daerah pada level kabupaten juga terkait dengan eksistensi distrik yang secara geografis yang memiliki rentang kendali yang terhambat kondisi geografis dalam efektivitas pelayanannya. Konteks spesifik lain terkait kehadiran pemerintah daerah/birokrasi adalah pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) dalam masyarakat serta penanganan gangguan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak.

Distrik sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan memiliki posisi strategis dalam mensinergikan kekuatan pelayanan pada level perangkat daerah dengan potensi keberdayaan masyarakat pada level kampung dan kampung adat. Dengan posisi strategis itu distrik diposisikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelatihan SDM dan pusat data/informasi pembangunan. Melalui penguatan distrik, perangkat daerah menempatkan aparatnya di setiap distrik, sementara itu warga kampung dan kampung adat datang ke pusat distrik untuk belajar dan mendapatkan pelayanan dari PD baik melalui UPTD maupun melalui aparat PD yang ditugaskan di distrik. Dengan strategi ini PD dominan beroperasi pada level distrik sementara pemerintahan kampung dan kampung adat beroperasi melalui RPJMK, RKPK dan APBK.

Strategi-9: Peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal's (SDGs) menempatkan aspek lingkungan sebagai pilar utama dalam menopang aspek ekonomi dan aspek sosial. Asas dari pembangunan berkelanjutan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi berikutnya baik atas sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Meskipun Kabupaten Jayapura masih dominan diliputi oleh pepohonan serta vegetasi dari berbagai jenis tetapi tetap saja kelestarian dan daya dukung lingkungan pesisir, danau, dataran rendah dan dataran tinggi tersebut memerlukan strategi yang tepat untuk memeliharanya. Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam yang mematuhi



arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW, selain itu juga upaya langsung dalam memantau dan melakukan tindakan pemeliharaan terhadap kualitas lingkungan hidup daerah mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Sebagian dari wilayah Kabupaten Jayapura merupakan perkotaan yang padat serta merupakan pintu gerbang Papua dengan keberadaan bandara Sentani, maka menjadi tuntutan menjaga kebersihan dan keindahan kota melalui penanganan sampah dalam kaidah-kaidah ekologis dan keberlanjutan serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

B. Arah Kebijakan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan dalam RPJMD adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berbeda setiap tahun bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada PD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Berdasarkan pemahaman demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura selama periode 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2020.

Prioritas pembangunan pada tahun 2020 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dan penyesuaian dengan visi-misi kepada daerah dilakukan pada penyusunan APBD perubahan. Tema pembangunan pada tahun ini adalah *“Perwujudan ketertiban, ketenteraman dan tatanan sosial yang ramah sebagai manifestasi manusia berkualitas dengan didukung oleh perbaikan infrastruktur wilayah”*. Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada:

1. Pemenuhan sarana-prasarana pendidikan;



2. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan;
 3. Pemenuhan ketersediaan barang dan jasa utama;
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
 5. Pengendalian inflasi dan ketersediaan barang konsumsi utama;
 6. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
 7. Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
 8. Pengembangan industri dan perdagangan berbasis UMKM dan koperasi;
 9. Penataan pemukiman dan perumahan serta pemenuhan fasilitas air minum dan sanitasi;
 10. Perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 11. Pengembangan fungsi distrik sebagai pusat pelatihan, pemberdayaan, pelayanan serta data dan informasi;
 12. Pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar;
 13. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak;
 14. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup berbasis pengetahuan lokal dan masyarakat hukum adat.
- (2) Arah kebijakan pembangunan tahun 2021

Tema pembangunan pada tahun 2021 adalah *“Penguatan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh situasi kondusif yang tenteram, tertib dan aman”*. Arah kebijakan tahun 2021 akan disinkronkan terhadap penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan akan berkontribusi signifikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan ajang dimaksud. Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada:

1. Perbaikan proses belajar-mengajar;
2. Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan;
3. Pemenuhan ketersediaan barang dan jasa utama;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
5. Penguatan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
6. Pengembangan industri dan perdagangan berbasis UMKM dan koperasi;
7. Pemenuhan sarana-prasarana perhubungan darat, udara dan perairan serta fasilitas air minum dan sanitasi.;
8. Akselerasi pencapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
9. Penguatan fungsi distrik sebagai pusat pelatihan, pemberdayaan, pelayanan serta data dan informasi;
10. Pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar;
11. Pemantapan sensitivitas gender dalam perencanaan dan



penganggaran;

12. Penanganan sampah secara terpadu pada wilayah perkotaan.

(3) Arah kebijakan pembangunan tahun 2022

Tahun 2022 adalah akhir periode RPJMD dan merupakan pemantapan atas berbagai pencapaian dan mengejar target-target sasaran yang belum tercapai. Tema pembangunan pada 2022 adalah *“Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan kampung adat serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam dalam tatanan sosial yang ramah”*. Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada:

1. Pengembangan pendidikan kesetaraan dan literasi masyarakat;
2. Akselerasi pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
3. Pemantapan kompetensi teknis dan kewirausahaan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
5. Pemantapan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
6. Pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan serta penguatan industri kecil/kerajinan;
7. Pemantapan pemenuhan sarana air minum dan infrastruktur jalan;
8. Pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
9. Pemantapan fungsi distrik sebagai pusat pelatihan, pemberdayaan, pelayanan serta data dan informasi;
10. Pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar;
11. Pemantapan kampung dan kampung adat ramah anak;
12. Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.

1. VISI

Visi dalam RPJPD disusun sebagai tujuan yang menjadi sasaran untuk dicapai dalam jangka panjang dan didasarkan atas tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan faktor-faktor strategis yang muncul.

Visi RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2005-2022 diformulasi sebagai berikut:



“TERWUJUDNYA MANUSIA JAYAPURA YANG TERDEPAN DI PAPUA”

Upaya-upaya yang dimaksud dilaksanakan melalui Misi Pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkualitas serta bermartabat;
- 2) Mewujudkan terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- 3) Mewujudkan masyarakat sadar hukum, demokratis, damai, serta partisipatif;
- 4) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik;
- 5) Terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 6) Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, visi dalam RPJMD tahun 2017-2022 merupakan gambaran tentang kondisi Kabupaten Jayapura yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2017-2022. Substansi utama dari visi tersebut merupakan rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2022. Visi ini memberi kejelasan tentang arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, rumusan visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun, menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, menjelaskan/mengakomodasi keunikan yang dimiliki daerah dalam jangka menengah, dan menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

Sebagai acuan nasional, visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai acuan Provinsi, Visi RPJMD Provinsi Papua adalah “Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik”. Sebagai acuan jangka panjang kabupaten, visi RPJPD Kabupaten Jayapura 2005-2025 adalah “Terwujudnya Manusia Jayapura yang Terdepan di Papua”. Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi yakni: 1. Terdepan dalam kualitas manusia; 2. Terdepan dalam kualitas



masyarakat; 3. Terdepan dalam kualitas pemerintahan; 4. Terdepan dalam kualitas wilayah. Ini berarti bahwa poin penting dibalik visi RPJPD Kabupaten Jayapura adalah kualitas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah teridentifikasi masalah utama pembangunan Kabupaten Jayapura secara jangka menengah yakni: (1) rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia; (2) kurang berdayanya masyarakat adat; (3) kurang berkembangnya kampung adat; (4) rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan; (5) kurang mantapnya infrastruktur wilayah; (6) belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik; (7) belum optimalnya kepuasan atas pelayanan publik; (8) rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam masyarakat; (9) adanya ancaman terhadap daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam. Dari berbagai masalah pokok tersebut maka dapat dirumuskan pokok visi dan pernyataan visi untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perumusan Visi

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	<i>Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</i>	Manusia berkualitas	Jayapura Berkualitas
2.	<i>Kurang berdayanya masyarakat adat</i>	Masyarakat adat berkualitas	
3.	<i>Kurang berkembangnya kampung adat</i>	Kampung adat berkualitas	
4.	<i>Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan</i>	Ekonomi sejahtera	Jayapura Sejahtera
5.	<i>Kurang mantapnya infrastruktur wilayah</i>	Infrastruktur mantap	
6.	<i>Belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik</i>	Ramah pemerintahan	Jayapura Ramah
7.	<i>Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik</i>	Ramah pelayanan	
8.	<i>Rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat</i>	Ramah sosial	
9.	<i>Adanya ancaman kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam</i>	Ramah Lingkungan	

Sumber : RPJMD 2017 – 2022, Bappeda Kab. Jayapura



Dari tabel 2.1 pernyataan visi dapat diformulasi rumusan visi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 yakni:

VISI:

“KABUPATEN JAYAPURA BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN RAMAH”

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni “Jayapura berkualitas”, “Jayapura sejahtera”, “Jayapura ramah”. Ketiga pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan visi tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan, dimana Jayapura berkualitas, sejahtera dan ramah adalah substansi utama sementara Jayapura berkelanjutan merupakan prakondisi bagi perwujudan substansi utama tersebut.

Jayapura berkualitas adalah kondisi kualitas manusia secara umum yang semakin berkualitas dan berdayasaing, ditandai oleh derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, dengan ditopang oleh eksistensi masyarakat adat yang semakin berdaya dan kampung adat yang semakin berkembang, sesuai dengan karakteristik sosial-budaya daerah.

Jayapura sejahtera adalah kondisi kehidupan ekonomi kerakyatan yang semakin tangguh didukung infrastruktur wilayah yang semakin membuka konektivitas distrik maupun kampung. Ekonomi kerakyatan dimaksud adalah perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan pada seluruh distrik dan kampung.

Jayapura ramah adalah kondisi tatanan masyarakat Kabupaten Jayapura yang hidup dan berkembang dalam heterogenitas sosial yang tinggi tetapi harmonis dan damai serta sensitif terhadap gender dan perlindungan anak dengan ditopang oleh tatakelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, jayapura juga ramah lingkungan, yakni kondisi dimana daya dukung lingkungan dan sumber daya alam tetap terpelihara dan seluruh upaya pembangunan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*).



Prinsip dasar dari rangkaian pokok visi tersebut adalah “adat yang kuat”, “perekonomian rakyat yang meningkat” dan “daerah yang berkualitas”, yang pada gilirannya menopang tujuan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan rangkaian pilar perubahan itulah yang akan didorong pencapaiannya. Semboyan di balik rumusan visi ini adalah:

SEMBOYAN

“ADAT KUAT, EKONOMI RAKYAT MENINGKAT, JAYAPURA BERKUALITAS”

Rangkuman penjelasan visi ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2 Penjelasan Visi

Visi	Pernyataan Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Jayapura Berkualita, Sejahtera dan Ramah	<i>Jayapura Berkualitas</i>	<i>Kondisi dimana kualitas manusia meningkat melalui kemajuan pendidikan dan kesehatan dengan masyarakat adat yang berdaya dan kampung adat yang berkembang.</i>
	<i>Jayapura Sejahtera</i>	<i>Kondisi dimana produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan perdagangan meningkat secara berbasis ekonomi kerakyatan dengan dukungan infrastruktur wilayah yang mantap.</i>
	<i>Jayapura Ramah</i>	<i>Kondisi dimana tata kelola pemerintahan berjalan dengan akuntabel dan memberi pelayanan publik memuaskan dengan menempatkan distrik sebagai pusat pelayanan, responsif gender dan ramah anak, serta berkelanjutan dan ramah lingkungan</i>

Sumber : RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022

2. Misi

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Kriteria rumusan misi adalah: 1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi; 2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; 3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

MISI KABUPATEN JAYAPURA

- (1) Meningkatkan kualitas manusia
- (2) Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat
- (3) Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
- (4) Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur



(5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(6) Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Adapun penjelasan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Penjelasan Misi

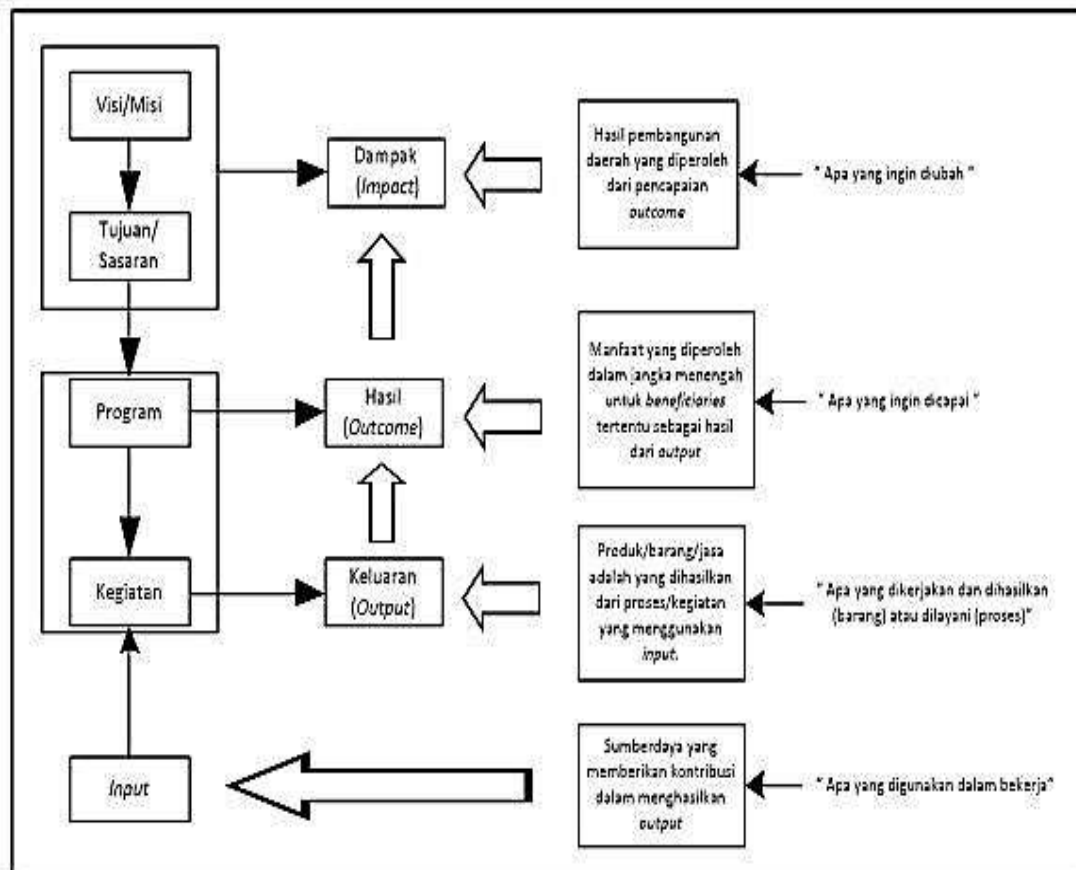
No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Jayapura Berkualitas	<i>Meningkatkan kualitas manusia</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat</i>
		<i>Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan masyarakat hukum adat dan pengembangan kampung adat</i>
2.	Jayapura Sejahtera	<i>Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata.</i>
		<i>Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman.</i>
3.	Jayapura Ramah	<i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum dalam peningkatan akuntabilitas pemerintahan, penguatan responsivitas gender dan perlindungan anak, serta penguatan distrik sebagai pusat pelayanan publik</i>
		<i>Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam</i>	<i>Misi ini mencakup upaya umum pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.</i>

Sumber : RPJMD Kabupaten Jayapura, 2017-2022

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : RPJMD Kabupaten Jayapura, 2017-2022

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah di perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, reasonable, time-bond (SMART-C)*.

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dengan tujuan, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 adalah:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72,10
Angka rata-rata lama sekolah	%	10,25
Angka harapan lama sekolah		14,75
Angka melek huruf	%	98,7

Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Angka Harapan Hidup	%	67,9

Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya daya beli masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Laju Inflasi	%	1,27
Angka kemiskinan	%	13,03

Sasaran Strategis 4		
Meningkatnya peranan masyarakat adat dalam pembangunan daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Persentase masyarakat adat yang mendapat pengakuan	%	100

Sasaran Strategis 5		
Meningkatnya peranan kampung adat dalam pembangunan daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Jumlah Kampung adat yang telah ditetapkan perbup dan perda	kampung	4

Sasaran Strategis 6		
Meningkatnya produksi dan produktivitas perekonomian rakyat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Pertumbuhan ekonomi	%	8,78
Angka kemiskinan	%	13,13
Tingkat pengangguran terbuka	%	9,92
Pertumbuhan PDRB	%	11,04
Gini ratio	%	0.4

Sasaran Strategis 7		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0.0008
Jumlah arus penumpang angkutan umum (pengguna	Km	2



terminal, pelabuhan dan bandara)		
Jumlah terminal dan pelabuhan dan bandara yang terpelihara	Unit	31
Rumah berakses air bersih	%	60
Rumah yang bersanitasi	%	60
Rasio rumah layak huni	Unit	2

Sasaran Strategis 8		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Opini BPK atas laporan keuangan	Predikat	WTP
Nilai Sakip	Nilai	B

Sasaran Strategis 9		
Meningkatnya peranan distrik sebagai pusat pelayanan publik		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Distrik yang berperan dalam penyediaan data dan informasi	%	100
Distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat	%	94,74
Distrik yang berperan dalam pelatihan	%	94,74

Sasaran Strategis 10		
Terpenuhinya standar minimal pelayanan dasar		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Indeks kepatuhan terhadap SPM	%	100

Sasaran Strategis 11		
Berkembangnya responsifitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Rasio KDRT	%	0.04
Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	%	22

Sasaran Strategis 12		
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
Rasio luas lahan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	%	5
Hasil pengukuran Indeks kualitas air	Lokasi	5
Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	Lokasi	0
Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	Lokasi	0

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 1.212.117.089.381,34**





A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas LKjIP dimana LKjIP harus menggambarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Rentang	Kategori Pencapaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik (SB)
2	Lebih dari 75 % sd 99 %	Baik (B)
3	55 % sd 74 %	Cukup Baik (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Jayapura telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura Tahun 2017–2022.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



➤ **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

➤ **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sasaran yang mengacu visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja ;
 - Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja ;
 - Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja ;
 - Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja ;
 - Misi V terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja ;
 - Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja ;
- (12 Sasaran Strategis dengan 32 Indikator Kinerja Sasaran)

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Misi 1	1	3	7	Sangat Baik = 2, Baik = 4
2	Misi 2	1	2	2	Sangat Baik = 5, Baik = 1 Kurang = 0
3	Misi 3	1	1	5	Sangat Baik = 8, Baik = 3 Kurang = 3
4	Misi 4	1	1	6	Sangat baik = 9, Baik = 0 Cukup Baik = 0
5	Misi 5	1	4	8	Sangat Baik = 9, Baik = 1
6	Misi 6	1	1	4	Sangat Baik = 3,
	Jumlah	6	12	32	



Dari 12 sasaran strategis dengan 32 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Misi 1 (6 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	2	33,33
2	Baik	4	66,67
3	Cukup Baik	0	0,00
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	6	100,00
Misi 2 (6 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	5	83,33
2	Baik	1	16,67
3	Cukup Baik	0	0,00
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	6	100,00
Misi 3 (14 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	8	57,14
2	Baik	3	21,43
3	Cukup Baik	3	21,43
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	14	100,00
Misi 4 (9 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	9	100,00
2	Baik	0	0,00
3	Cukup Baik	0	0,00
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	9	100,00
Misi 5 (10 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	9	90,00
2	Baik	1	10,00
3	Cukup Baik	0	0,00
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	10	100,00
Misi 6 (4 Indikator Sasaran)			
1	Sangat Baik	3	100,00
2	Baik	0	0,00
3	Cukup Baik	0	0,00
4	Kurang Baik	0	0,00
	Jumlah	3	100,00
	Total Indikator Sasaran	48	

Catatan : Misi 3 terdapat 1 Indikator masih dalam Audit BPK RI, 1 belum dirilis BPPS



Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 sasaran yang mencakup 48 indikator sasaran, diketahui bahwa terdapat 36 indikator sasaran atau 64,29 % sangat baik, dan 16 indikator sasaran atau 10,71% baik, 1 indikator sasaran atau 1,79% cukup baik, dan 6 indikator sasaran atau 26,79% kurang baik. Jadi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 sangat baik. Terdapat 1 (satu) indikator yang belum dirilis oleh BPS.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2021 yang merupakan tahun ke lima RPJMD 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Jayapura secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui sebelas 12 (dua belas) sasaran strategis dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jayapura. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 12 (dua belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 97.96% dengan predikat BAIK. Hal ini dapat dilihat pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	71.70	71.69	99.99	72.10	72.03	99.90	72.5	99.35
2	Angka rata-rata lama sekolah	%	10.25	10.04	97.95	10.55	10.05	95.26	11	91.36
3	Angka harapan lama sekolah	%	14.75	14.20	96.27	14.75	14.39	97.56	15	95.93
4	Angka melek huruf	%	98.65	97.83	99.17	98.70	97.83	99.12	98.8	99.02
	Rata-rata capaian kinerja				98.34			97.96		96.42



Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.678.223.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.481.246.000,- dengan capaian 96,53%.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 58.897.079.026,- dan realisasi sebesar Rp. 60.724.542.422,71,- dengan capaian 103,10%.
3. Program Pendidikan Non Formal, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.203.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.941.250.000,- dengan capaian 88,09%.
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, TIDAK DILAKSANAKAN.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

- Adanya bantuan dana BOS Kabupaten Jayapura untuk jenjang SD, dan SLTP/ sederajat baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
- Adanya kegiatan Bantuan Akhir Studi pada jenjang perguruan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu.
- Alokasi anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan maupun sarana prasarana pendidikan dari APBD maupun APBN.
- Tingginya minat tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1 atau S2 dan memiliki sertifikasi.
- Partisipasi orang tua murid dalam pembangunan sekolah khususnya untuk jenjang SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui penerapan dalam pengelolaan sekolah dengan pendekatan majemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Hambatan/Masalah

- Kurangnya penyerapan dana pendidikan terutama yang bersumber dari DAK karena terlambatnya aturan pelaksanaan (juklak dan juknis) dari pemerintah pusat.
- Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA.
- Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi dan juga belum memiliki sertifikasi.
- Belum terdianya akses pendidikan yang memadai dan merata pada semua distrik terutama untuk distrik dengan kondisi geografis yang sulit dan harus ditempuh melalui perhubungan udara maupun sungai.
- Kurang memadainya tenaga pendidik di daerah-daerah sulit transportasi



- Masih adanya tenaga pendidik yang kurang bertanggungjawab pada daerah-daerah terpencil dan sering meninggalkan tempat tugas.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Meningkatkan akses pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas.
- Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pendidikan melalui program Paket A, paket B dan Paket C
- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengakomodir guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi S.1

Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Jayapura memperlihatkan capaian kinerja sebesar 98.91% dengan predikat BAIK.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas kampung adalah :

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	%	67.7	67.05	99.04	67.9	67.16	98.91	68	98.76
Rata-rata capaian kinerja					99.04			98.91		98.76

Dari hasil evaluasi di atas diperlukan program yang dapat mendukung tercapainya sasaran yaitu sebanyak 12 program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 519.487.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 326.555.500,- dengan tingkat capaian 62,86%.
2. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 961.392.580,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 326.555.500,- dengan tingkat capaian 96,00%.
3. Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.620.000,- dengan tingkat capaian 97,62%.
4. Program Pelayanan Kesehatan Balita , jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 61.802.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.802.100,- dengan tingkat capaian 100%.



5. Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan tingkat capaian 100%
6. Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 135.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.800.000,- dengan tingkat capaian 100%
7. Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan tingkat capaian 0
8. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, kegiatan ini telah dianggarkan didalam kegiatan pelayanan usia produktif.
9. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, kegiatan ini telah dianggarkan didalam kegiatan pelayanan usia produktif.
10. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan tingkat capaian 100%
11. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.560.000,- dengan tingkat capaian 78,73%
12. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 291.465.000,- dengan tingkat capaian 97,16%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Surveilans yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan seluruh petugas Kesehatan Lingkungan di fasilitas layanan kesehatan
- Pendekatan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SK. Menkes No.317/MENKES/SK/V/2009 tentang petunjuk Teknis Perencanaan dan pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- Monitoring dan evaluasi yang terpadu serta pelaksanaan *on the job training* bagi petugas kesehatan dalam pelaksanaan program-program kesehatan
- Bantuan peningkatan kemampuan teknis tenaga kesehatan melalui lembaga-lembaga donor kesehatan.

Hambatan/Masalah :

- Peran serta masyarakat yang masih sangat minim dalam membangun kesehatan yang mandiri di masyarakat,
- Kabupaten Jayapura sebagai daerah lintas kabupaten-kabupaten lain, sehingga beban kerja pembangunan kesehatan semakin tinggi,
- Masih terbatasnya tenaga kesehatan baik dokter spesialis, tenaga medis, paramedis untuk bertugas di Pustu-pustu kampung,
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidup dan pola makan yang higienis untuk menjaga kesehatan.



Strategi/Upaya Pemecahan :

- Melakukan pendekatan secara menyeluruh program dan kegiatan agar sesuai dengan petunjuk SK. MENKES no. 317 Tahun 2009 serta hasil perhitungan Costing SPM Kesehatan
- Pembangunan kesehatan yang mandiri bagi masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kegiatan lebih banyak ke masyarakat seperti gerakan wajib kampung bebas malaria, gerakan kampung siaga aktif dan kerjasama dengan kader-kader kampung, sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih baik.
- Merekrut tenaga kontrak dengan basis keperawatan dan kebidanan untuk menjawab kekurangan tenaga medis di lapangan.
- Penguatan kapasitas SDM melalui strategi *in the house training, on the job*, maupun monitoring evaluasi terpadu yang terstruktur dan terorganisir.

Sasaran 3: Meningkatkan daya beli masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan daya beli masyarakat pada tahun 2021 sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 125.92% dengan predikat SANGAT BAIK sebagaimana pada table 3.7 berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Laju inflasi	%	0.76	0.75	98.68	1.27	1.02	80.31	1.02	100
2	Angka kemiskinan	%	13.08	12.44	95.11	13.50	7.87	171.53	12.98	93.45
	Rata-rata capaian kinerja				96.90			125,92		96.73

Upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka dilakukan setiap tahun, yang pada tahun 2021 dilakukan melalui 2 program yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja), TIDAK DILAKSANAKAN karena tidak tersedia dana.
2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 168.443.946,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.964.450,- dengan tingkat capaian 99,12%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Terbukanya lapangan kerja dengan adanya investasi swasta di bidang perkebunan dan pertambangan.
- Adanya berbagai pelatihan, kursus dan magang yang dilaksanakan oleh SKPD teknis baik di dalam maupun luar Papua.
- Adanya regulasi (Perda) pembentukan kampung adat yang memberi peluang kepada masyarakat adat untuk mengoptimalkan SDA disetiap kampung asli.



Hambatan/Masalah :

- Kurangnya ketrampilan para pencari kerja sehingga tidak mampu bersaing memasuki bursa kerja yang kompetitif
- Tingginya minat pencari kerja yang cenderung memilih sebagai calon pegawai negeri sipil sehingga setiap kelulusan pendidikan akan menambah panjang deret pengangguran karena rekrutmen pegawai sangat terbatas setiap tahunnya.
- Membanjirnya penduduk pendatang ke Kabupaten Jayapura setiap tahunnya akan menjadi beban pembangunan karena menambah angka pengangguran.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Kebijakan daerah untuk memberi kelonggaran para investor menanamkan investasinya diharapkan akan membuka lapangan kerja baru.
- Mendorong perkembangan usaha sektor industri, perusahaan dan jasa yang dapat mengurangi angka pengangguran.

Sasaran 4: Meningkatkan peranan masyarakat adat dalam pembangunan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan peranan masyarakat adat dalam pembangunan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat SANGAT BAIK

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan kampung :

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Persentase masyarakat adat yang mendapat pengakuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja				100			100		100

Tingkat capaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 terhadap target kinerja tahun kelima RPJMD tahun 2017-2022 adalah :

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui 2 program saja yakni :

1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.477.726.250,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.298.182.350,- dengan tingkat capaian 92,75%
2. Program penetapan tanah ulayat, TIDAK DILAKSANAKAN.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- **Komitmen Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura dalam memberikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Distrik dan Kepala Kampung dengan mengalokasikan dana kampung (ADK) guna penentuan prioritas pembangunan dengan kearifan lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung .**
- **Adanya respons positif dari mitra pemerintah yaitu para tokoh adat, agama dan masyarakat yang mendukung program pemerintah.**

Hambatan/Masalah :

- **Masih adanya pemahaman sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan adalah semata-mata tugas pemerintah.**
- **Belum jelasnya batas-batas wilayah adat sehingga sering kali menjadi masalah dan penghambat kelancaran proses pembangunan.**

Strategi/Upaya Pemecahan :

- **Penguatan kelembagaan melalui pembinaan dan sosialisasi secara kontinyu dan berkesinambungan kepada aparatur kampung, tokoh adat, agama dan masyarakat.**
- **Legalitas kampung adat dan hutan adat berdasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Peraturan Daerah.**

Sasaran 5 : Meningkatkan peranan kampung adat dalam pembangunan daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya peranan kampung adat dalam pembangunan daerah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat SANGAT BAIK sebagaimana dapat dilihat pada table 3.9 berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Jumlah adat yang ditetapkan oleh PERDA	kampung	4	4	100	4	4	100	20	100
	Rata-rata capaian kinerja									



Sasaran meningkatnya peranan kampung adat dalam pembangunan daerah dicapai melalui 1 program, yaitu :

“Program Penataan Desa), TIDAK DILAKSANAKAN”

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan yang lebih diarahkan pada prioritas pengembangan potensi unggulan kampung sehingga setiap kampung dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan arif melalui berbagai usaha bersama untuk kepentingan kampung.

Hambatan/Masalah :

- Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan aparat maupun masyarakat kampung dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada pada masing-masing kampung.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Pemberian kepercayaan penuh kepada tokoh agama, adat dan masyarakat dalam mengoptimalkan dan mengelola berbagai potensi yang tersedia di kampung.
- Peningkatan Skill dan keterampilan masyarakat kampung melalui Pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan baik oleh Pemerintah daerah maupun Lembaga-lembaga donor.
- Pengembangan ekonomi lokal secara masif sesuai potensi SDA dan SDM masing-masing kampung dengan mengoptimalkan potensi lokal serta keterlibatan masyarakat asli.

Sasaran 6 : Meningkatnya produksi dan produktivitas perekonomian rakyat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan melalui 5 (lima) program memperlihatkan capaian kinerja sebesar 84,82 dengan predikat BAIK.

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Pertumbuhan ekonomi	%	8.72	7.69	88.19	8.78	5.06	57.63	8.84	57.24
2	Gini Ratio	%	0.4	0.4	100	0.4	0.37	92.50	0.4	92.50
3	Angka kemiskinan	%	13.08	12.44	95.11	13.03	12.13	93.09	12.98	93.45
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	10.37	10.33	99.61	9.92	9.53	96.07	9.67	98.55
	Rata-rata capaian kinerja				95.73			84.82		85.45



Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui 5 program yaitu :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.566.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.270.158.008,- dengan tingkat capaian 88,44%
2. Program pengelolaan perikanan budidaya, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.660.028.678,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.646.811.000,- dengan tingkat capaian 99,64%
3. Program pengelolaan perikanan tangkap, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.611.342.452,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.605.078.000,- dengan tingkat capaian 99,76%
4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.361.071.378,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.153.971.778,- dengan tingkat capaian 99,76%
5. Program peningkatan daya tarik pariwisata, TIDAK DILAKSANAKAN.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Letak topografi Kabupaten Jayapura yang strategis memungkinkan adanya peluang dan tingginya serapan pasar.
- Tersedianya sumber daya alam terutama lahan yang sangat memadai.
- Sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan.

Hambatan/Masalah :

- Kuatnya persaingan produksi dengan masuknya pedagang-pedagang Kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura.
- Fluktuasi harga produk pertanian yang mengakibatkan sering kali petani rugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan biaya yang diperoleh
- Alih fungsi lahan dari lahan perkebunan rakyat menjadi lahan-lahan perkebunan tanaman industri.
- Tingginya tingkat serangan hama dan penyakit tanaman terutama untuk tanaman Kakao.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Peningkatan pembinaan dan penyuluhan lapangan terhadap petani dan nelayan diiringi pengadaan bantuan modal dan penciptaan pasar.
- Peningkatan SDM dan peningkatan kelembagaan petani dalam melakukan perencanaan tanam sampai panen serta menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam pemasaran hasil produksi.



- **Fasilitasi pemasaran melalui promosi dengan mengikuti berbagai event pameran baik lokal maupun nasional.**
- **Pelatihan dan penumbuhan motivasi pengusaha kecil menengah, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan inovasi produk agar mampu bersaing dengan produk luar.**

Sasaran 7 : Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 96.78% dengan predikat **SANGAT BAIK**.

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0.0008	0.0005	62.5	0.0008	0.0008	100	0.0008	62.50
Jumlah arus penumpang angkutan umum (pengguna terminal, pelabuhan dan bandara)	KM	1.5	1.5	100	2	2	100	217.37	0.69
Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara terpelihara	Unit	31	31	100	31	31	100	33	93.94
Rumah berakses air bersih	%	60	57	95	60	55.13	92	76	72.54
Rumah yang bersanitasi	%	60	58	97	60	53.29	89	77.33	68.91
Rasio rumah layak huni	Unit	2	2	100	2	2	100	28.39	7.04
Rata-rata capaian kinerja				92.36			96.78		50.94

Untuk mencapai sasaran kinerja dilakukan dengan 6 program yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 21.479.544.944,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.562.798.644,40,- dengan tingkat capaian 95,73%.
2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.269.002.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.057.268.200,- dengan tingkat capaian 83,31%.
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.059.100.891,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.022.659.797,- dengan tingkat capaian 98,23%
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 367.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.750.000,- dengan tingkat capaian 99,66%
5. Program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 7.599.649.930,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.375.035.007,- dengan tingkat capaian 97,04%
6. Program Pelayanan Perumahan bagi korban bencana dan relokasi, **TIDAK eDILAKSANAKAN.**



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai pada tahun anggaran 2018 untuk sektor infrastruktur transportasi.
- Percepatan penyelesaian pelabuhan kontainer Depapre dan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Alang-alang Bonggrang mendorong penyelesaian jalan sebagai prioritas utama.
- Kesesuaian antara program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan rencana masyarakat dalam mengembangkan program kampung.
- Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dapat berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan harapan
- Program dilaksanakan mengikuti perencanaan yang sudah disusun sehingga mempermudah pelaksanaan.
- Kesadaran masyarakat untuk direlokasi ke daerah yang tidak rawan bencana.

Hambatan/Masalah :

- Pembangunan jalan, jembatan dan berbagai fasilitas umum sering terkendala pada proses ganti rugi atas hak ulayat dan tanaman.
- Masih adanya masyarakat yang berkeinginan untuk menjalankan program sesuai dengan keinginan kelompoknya
- Memberikan pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Kondisi geografis di Kabupaten Jayapura antar kampung dan Distrik yang berjauhan dan akses masuk ke kampung terkadang sulit.
- Tersosialisasikannya program pembangunan dan penataan rumah layak huni bagi masyarakat
- Adanya koordinasi antar stakeholder sehingga selalu ada koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penataan permukiman

Sasaran 8 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan* dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95,84% dengan predikat BAIK.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal adalah :



Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Target RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	-	100,00	WTP	-	100,00	WTP	100,00
2	Nilai LAKIP/SAKIP	-	B	98,30	98,30	B	96,87	96,87	B	98,30
3	Indeks kepuasan masyarakat	-	75	80	106,67	75	68	90,67	80	85,00
	Rata-rata capaian kinerja							95,84		94,43

Sasaran Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan akan dicapai melalui 3 program yaitu :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.205.497.325,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.180.049.881,- dengan tingkat capaian 99,21%**
- 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 229.580.656.670,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 154.436.611.348,04,- dengan tingkat capaian 67,27%**
- 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.173.720.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.147.080.000,- dengan tingkat capaian 99,36%**

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu dan bebas KKN antara lain Mengeluarkan Instruksi Bupati Jayapura Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan transparan sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003; Melakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi para pihak (panitia pengadaan dan rekanan) yang terlibat proses pengadaan barang dan jasa di setiap SKPD dan dilampirkan dalam tiap kontrak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- **Adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.**
- **Dukungan Apatur Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui penanda tanganan MoU dengan pihak BPKP dan Kejaksaan untuk pembangunan zona integritas bebas korupsi.**



- Adanya kesepakatan bersama untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni setiap tahunnya oleh seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- Adanya sinergitas dari seluruh Tim E-Sakip di Pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga pada tahun 2018 belum mampu mendapatkan nilai Akip predikat B tetapi sudah lebih baik. Hal ini adanya kenaikan 8,43 poin dari 50,41 menjadi 58,84 dan ini menjadikan tertinggi dibanding seluruh Kabupaten/Kota se Papua.

Hambatan/Masalah :

- Masih adanya kesalahan administrasi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD.
- Dengan ditanda tangannya "pakta integritas" bagi setiap pejabat berdampak adanya tindakan ekstra hati-hati dan keraguan dari pimpinan SKPD untuk mengambil keputusan yang menyangkut keuangan, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- Penilaian dari assessor terhadap nilai LKjIP seluruh perangkat daerah belum seluruhnya mengirim ke Inpektorat sehingga kesulitan dalam memberikan predikat penilaian.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Setiap SKPD wajib mengupayakan optimalisasi kinerja sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani dalam perjanjian kinerja SKPD.
- Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui sosialisasi pelatihan serta aturan keuangan yang baru dikeluarkan pemerintah pusat.
- Tahun 2020 diupayakan seluruh perangkat daerah telah mengirim LKjIP dengan menggunakan E-Sakip agar predikat penilaian meningkat dari CC menjadi minimal B

Sasaran 9 : Meningkatkan peranan distrik sebagai pusat pelayanan publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Meningkatnya peranan distrik sebagai pusat pelayanan publik* dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat SANGAT BAIK

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021 (%)	Capaian RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
Distrik yang efektif berperan dalam penyediaan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan SDM	%	15	31	206,67	15	31	206,67	19	84,21
Distrik yang berperan dalam penyediaan data dan informasi	%	5	5	100,00	5	5	100,00	19	63,16
Distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat	%	0	0	0,00	0	0	0,00	19	63,16
Distrik yang berperan dalam pelatihan	%	0	0	0,00	0	0	0,00	19	84,21
Rata-rata capaian kinerja				76,67			76,67		73,68



Sasaran Meningkatnya peran distrik dalam pelayanan kepada masyarakat akan dicapai dengan program yaitu :

“Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik , jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.667.404.731,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.467.983.450,- dengan tingkat capaian 92,52%”

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam layanan dan pengelolaan informasi antara lain :

- Tersedianya akses internet dalam proses pengelolaan layanan informasi dan komunikasi

Kendala/ Hambatan :

- Terbatasnya tenaga SDM bidang pengelolaan konten webside Dinas Kominfo
- Kurangnya fasilitas computer dalam mendukung kelancaran pengelolaan informasi dan komunikasi
- Tidak tersedianya sarana oprasional kendaraan roda 4 (empat) bagi kepentingan peliputan kegiatan pemerintah
- Kurangnya dana pendukung oprasional kegiatan khusus bagi bidang IKP

Solusi

- Dibutuhkan penambahan tenaga SDM bidang pengelolaan website
- Dibutuhkan penambahan sarana computer bagi kepentingan pekerjaan teknis bidang IKP
- Sangat dibutuhkan ketersediaan kendaraan oprasional bagi kepentingan peliputan kegiatan
- Dibutuhkan anggaran bagi oprasional kegiatan teknis bidang IKP

Sasaran 10 : Terpenuhinya standard minimal pelayanan dasar

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terpenuhinya standard minimal pelayanan dasar memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat SANGAT BAIK

**Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Indeks kepatuhan terhadap SPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja				100			100		100



Sasaran 11 : Berkembangnya responsivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran berkembangnya responsivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 2 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 70.46% dengan predikat BAIK sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Rasio KDRT	%	0,04	0,06	66,67	0,04	0,07	57,14	0,03	42,86
2	Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	%	22	14	63,64	22	18,43	83,77	26	70,88
Rata-rata capaian kinerja					65,15			70,46		56,87

Sasaran Berkembangnya responsivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dicapai dengan 2 program yaitu :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak/perempuan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.495.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.493.949.000,- dengan tingkat capaian 99,96%
2. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.220.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.218,949.000,- dengan tingkat capaian 99,91%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Komitmen kepala daerah yang didukung oleh kesiapan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan tugas yang dibebankan
- Keinginan masyarakat khususnya kaum perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami maupun pihak keluarga
- Keinginan sebagian dari kaum perempuan untuk memberanikan diri tampil sebagai pelindung dan pengayom bagi keluarga

Hambatan/Masalah :

- Beberapa perempuan yang sudah berkeluarga tidak diijinkan oleh suaminya karena mengganggu aktivitas sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pengasuh anak-anak



- Pengaruh adat dimana kaum perempuan selalu di belakang dan tidak diperbolehkan tampil karena adat menjunjung tinggi kehormatan perempuan.

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Pengembangan kelembagaan guna meningkatkan kemandirian kelembagaan perempuan
- Meningkatkan pemahaman pengarusutamaan gender
- Mendorong sumberdaya perempuan agar dapat mengembangkan dirinya menjadi perempuan berkualitas

Sasaran 12 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 100% dengan predikat **SANGAT BAIK**, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	5	5	100	5	5	100	5	100
2	Hasil pengukuran indeks kualitas air	lokasi	5	5	100	5	5	100	5	100
3	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja					100,00			100,00		100

Sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup akan dicapai dengan program : “Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran”

Untuk mencapai keberhasilan capaian indicator tersebut dilakukan dengan 2 program :

1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran, , jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.188.608.737,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.086.375.800,- dengan tingkat capaian 98,35%
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.938.716.435,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.836.801.000,- dengan tingkat capaian 98,28%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :



- **Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam penataan lingkungan.**

Hambatan/Masalah :

- **Belum optimalnya penerapan Green Design Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena sosialisasi tentang hal tersebut belum menyeluruh kepada semua masyarakat**

Strategi/Upaya Pemecahan :

- **Dilakukan sosialisasi secara berjenjang tentang pemanfaatan tata ruang wilayah sehingga ada kewajiban dan tanggungjawab bersama untuk menjaga pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.**

C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2020

Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, kebijakan belanja daerah untuk 5 tahun secara umum diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- 1) **Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja mengikat daerah berupa belanja gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya dengan *range* antara 40-45 % per tahun.**
- 2) **Meningkatkan proporsi belanja langsung, terutama pada belanja modal dan menekan belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas.**
- 3) **Memenuhi proporsi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan setiap tahun anggaran.**

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 di arahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. **Fungsi Alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasata karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;**



- b. Fungsi Distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan social, dan mengurangi kesenjangan, antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi Stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilisasi keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.212.117.089.381,34 dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Pendapatan**

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.243.541.845.948,99 setelah perubahan sebesar Rp 1.212.117.089.381,34 (berkurang sebesar Rp 31.424.756.567,65)

➤ **Belanja**

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1.468.927.783.007,27 setelah perubahan menjadi Rp 1.284.627.401.976,19 (berkurang sebesar Rp 184.300.381.031,08)

➤ **Pembiayaan**

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp 257.539.437.058,28 setelah perubahan sebesar Rp 257.539.437.058,28 (berkurang sebesar Rp 0,00)

➤ **Pengeluaran**

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp 32.153.500.000,00 setelah perubahan sebesar Rp 31.937.000.000,00 (berkurang sebesar Rp 216.500.000,00)

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Arah pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;



- b. Mendayagunakan dana melalui pemupukan modal saham di Bank Papua;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Syah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan



efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	LEBIH / (KURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.243.541.845.948,99	1.212.117.089.381,34	97,47	-31.424.756.567,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.086.311.056,60	125.484.060.130,34	78,39	-34.602.250.926,26
4.1.1	Pajak Daerah	85.221.336.667,60	44.309.500.522,80	51,99	-40.911.836.144,80
4.1.2	Retribusi Daerah	13.228.482.163,00	8.389.232.900,00	63,42	-4.839.249.263,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.401.230.726,00	4.151.230.726,00	94,32	-250.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	57.235.261.500,00	68.634.095.981,54	119,92	11.398.834.481,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.066.330.374.892,39	1.074.555.971.251,00	100,77	8.225.596.358,61
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.038.530.965.891,39	1.042.075.913.122,00	100,34	3.544.947.230,61
4.2.1.1	Dana Perimbangan	832.723.878.000,00	836.268.825.231,00	100,43	3.544.947.231,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	25.218.278.000,00	25.218.278.000,00	100,00	0,00
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	46.073.463.891,39	46.073.463.891,00	100,00	-0,39
4.2.1.5	Dana Desa	134.515.346.000,00	134.515.346.000,00	100,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.799.409.001,00	32.480.058.129,00	116,84	4.680.649.128,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	22.987.651.927,00	27.668.301.055,00	120,36	4.680.649.128,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.811.757.074,00	4.811.757.074,00	100,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.125.160.000,00	12.077.058.000,00	70,52	-5.048.102.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.125.160.000,00	12.077.058.000,00	70,52	-5.048.102.000,00
	BELANJA DAERAH	1.468.927.783.007,27	1.284.627.401.976,19	87,45	-184.300.381.031,08
5.1	BELANJA OPERASI	950.101.447.722,63	839.921.586.333,50	88,40	-110.179.861.389,13
5.1.1	Belanja Pegawai	408.773.688.347,63	380.860.894.367,39	93,17	-27.912.793.980,24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	501.054.683.587,00	420.880.617.396,11	84,00	-80.174.066.190,89
5.1.3	Belanja Bunga	3.559.895.833,00	3.429.261.810,00	96,33	-130.634.023,00
5.1.4	Belanja Subsidi	3.983.968.800,00	3.946.365.800,00	99,06	-37.603.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	24.174.111.155,00	22.249.696.960,00	92,04	-1.924.414.195,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.555.100.000,00	8.554.750.000,00	100,00	-350.000,00
5.2	BELANJA MODAL	312.893.137.822,64	247.865.577.431,65	79,22	-65.027.560.390,99



5.2.1	Belanja Modal Tanah	31.569.662.368,00	31.517.400.000,00	99,83	-52.262.368,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.873.289.242,00	35.836.812.499,96	92,19	-3.036.476.742,04
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.432.350.779,00	52.893.535.773,06	83,39	-10.538.815.005,94
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.974.728.172,64	125.676.420.159,63	71,83	-49.298.308.013,01
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.043.107.261,00	1.941.408.999,00	48,02	-2.101.698.262,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.953.795.254,00	2.949.588.434,04	99,86	-4.206.819,96
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.953.795.254,00	2.949.588.434,04	99,86	-4.206.819,96
5.4	BELANJA TRANSFER	202.979.402.208,00	193.890.649.777,00	95,52	-9.088.752.431,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	202.979.402.208,00	193.890.649.777,00	95,52	-9.088.752.431,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-225.385.937.058,28	-72.510.312.594,85	32,17	152.875.624.463,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.539.437.058,28	257.539.437.058,28	100,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	257.539.437.058,28	257.539.437.058,28	100,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.153.500.000,00	31.937.000.000,00	99,33	-216.500.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	216.000.000,00	0,00	0,00	-216.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.937.500.000,00	31.937.000.000,00	100,00	-500.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	225.385.937.058,28	225.602.437.058,28	100,10	216.500.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	153.092.124.463,43	0,00	153.092.124.463,43

Sumber : BPKAD, 2022

3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- b. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
- b. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 3.25 di atas.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2021. Dengan kaa lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2017-2022 dan telah memenuhi 18 (*delapan belas*) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 39 indikator kinerja sasaran.

Sehingga pencapaian indicator sasaran terhadap 12 sasaran yang mencakup 48 indikator sasaran, diketahui bahwa terdapat 36 indikator sasaran atau 64,29 % sangat baik, dan 16 indikator sasaran atau 10,71% baik, 1 indikator sasaran atau 1,79% cukup baik, dan 6 indikator sasaran 26,79% kurang baik. Jadi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 sangat baik. Terdapat 1 (satu) indicator yang belum dirilis oleh BPS.

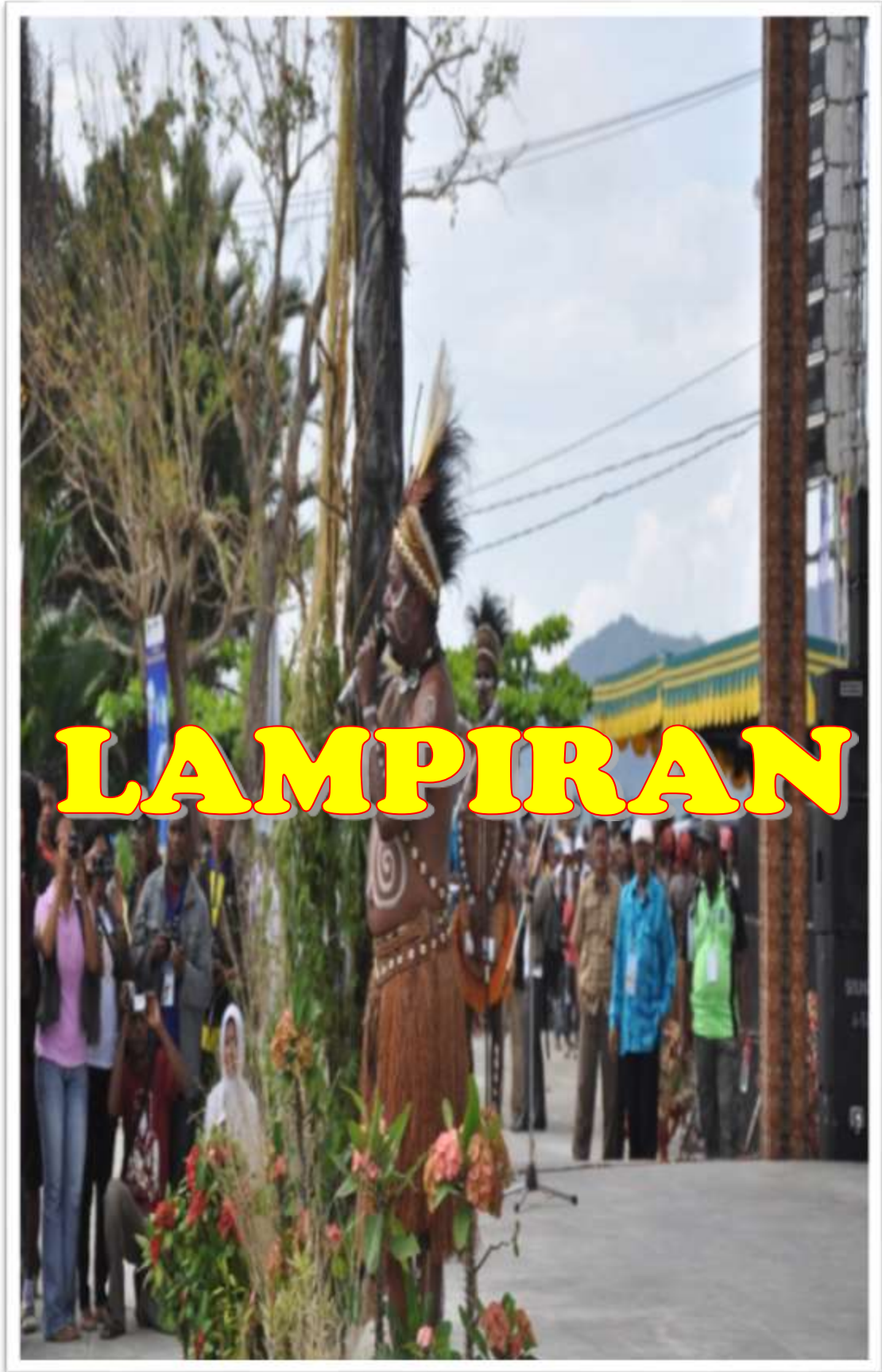
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.243.541.845.948,99 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.212.117.089.381,34 atau 97,47% (*un audit* per tanggal 11 Maret 2018). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit



melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
REVISI PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021**

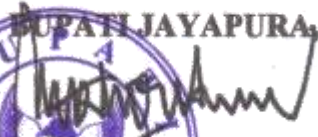

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Jabatan : BUPATI JAYAPURA

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sentani, Maret 2021


BUPATI JAYAPURA
MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si




Penetapan Kinerja Tahun 2021
Visi : “Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah”

No	Misi	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja (Impact)	Target 2021
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia	1	Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,10
				2	Indeks Pendidikan	72,75
				3	Angka harapan lama sekolah (thn)	14,65
				4	Angka melek huruf (%)	98,60
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	67,30
		3	Meningkatnya daya saing Sumber Daya/Tenaga kerja	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	14,50
2	Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	4	Meningkatnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan	7	% masyarakat hukum adat (MHA) / Dewan Adat Suku (DAS) yang terpelihara dalam pengakuan wilayah adat suku (%)	100
				8	Jumlah kampung adat yang telah ditetapkan perbub dan perda	5
				9	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sumber daya komunalnya mendapatkan sertifikasi.	4
				10	Jumlah masyarakat hukum adat yang efektif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kampung/ kampung adat dan daerah	9
				11	% karya seni dan kearifan lokal masyarakat adat yang dikembangkan.	5
		5	Berkembangnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan	12	Jumlah kampung adat yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	8
3	Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	6	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan	13	Pertumbuhan ekonomi	8,66
				14	Pengeluaran PDRB/kapita	10,64
				15	% penduduk di atas garis kemiskinan	65,33
				16	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	16,11
				17	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	23,13
				18	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	13,12
				19	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,12



No	Misi	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja (Impact)	Target 2021
		7	Meningkatnya peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat	20	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5,47
				21	% koperasi aktif	68,70
				22	% usaha mikro dan kecil	0,65
				23	% kontribusi pariwisata dalam PAD	0,05
		8	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	24	Jumlah wisatawan mancanegara dan domestic	122.000
				25	% PMKS yang terlayani	90
				26	% korban bencana yang mendapatkan jaminan social	100
				27	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0008
4	Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	9	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan	28	% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	0,55
				29	Jumlah arus penumpang angkutan umum (pengguna terminal, pelabuhan dan bandara)	1,5 KM
				30	Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara terpelihara	29
				31	% Rumah berakses air bersih	60
		10	Meningkatnya kapasitas pelayanan air minum dan penanganan limbah	32	% Rumah yang bersanitasi	60
				33	Rasio rumah layak huni	2
		11	Meningkatnya jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan	34	Rasio pemukiman layak huni	52
				35	% distrik yang berfungsi sebagai basis data elektronik (smart district)	100
		12	Meningkatnya jangkauan dan fungsi infrastruktur komunikasi			
		5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	13	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	36
37	Nilai LAKIP/SAKIP					B
38	Indeks kepuasan masyarakat					75
14	Meningkatnya kualitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat			39	% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	80
15	Berkembangnya sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan			40	Rasio KDRT	0,06
				41	Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	18



No	Misi	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja (Impact)	Target 2021
		16	Meningkatnya peran distrik dalam pelayanan kepada masyarakat	42	% Distrik yang efektif berperan dalam penyediaan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan SDM	4
				43	% distrik yang berperan dalam penyediaan data dan informasi	6
				44	% distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat	4
				45	% distrik yang berperan dalam pelatihan	4
6	Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	17	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	46	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	5
				47	Hasil pengukuran indeks kualitas air	50
				48	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	5
		18	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan	49	Timbulan sampah yang ditangani	15



PENGHARGAAN DARI CNBC INDONESIA



KABUPATEN JAYAPURA MENADAPATKAN WTP YANG KE 7



Keberhasilan
Pengelolaan Perusahaan Daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)



Penyerahan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2021 dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEPALA BKKBN